

## KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN CIKUTRA KOTA BANDUNG

Nita Marwiyah<sup>1</sup>, Nisrina Asiyah Utari<sup>2</sup>, Nucifera Salsabila<sup>3</sup>, Nurul Rahma<sup>4</sup>, Pahruroji<sup>5</sup>,  
Pungki Nurlatifah<sup>6</sup>, Resti Nurul<sup>7</sup>, Rushi Mu'min Aziz<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

e-mail: [nitamarwiyah17@gmail.com](mailto:nitamarwiyah17@gmail.com)

### ABSTRAK

Pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik antara warga dengan pemerintah, seperti yang terjadi di kelurahan Cikutra, Kota Bandung. Konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait pengelolaan sampah dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah yang tidak baik di cikutra dapat menimbulkan konflik antara warga dengan pemerintah, mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penumpukan sampah di cikutra, dan resolusi apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara secara mendalam dengan masyarakat dan aparat pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) Kurangnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah yang baik, (2) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah, termasuk pengadaan infrastruktur pengangkutan sampah, (3). Kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, dan (4). Kurangnya aturan yang jelas dan tegas seperti larangan membuang sampah secara sembarangan, dan sanksi bagi para pelanggar agar membuat masyarakat jera. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik yang terjadi di kelurahan cikutra merupakan masalah yang kompleks dan diperlukan upaya kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini.

**Kata Kunci:** Konflik, Sampah, Lingkungan, Permasalahan, Resolusi

### ABSTRACT

*Inadequate management of garbage can raise a variety of problems that potentially cause conflict between citizens and the government, as in the town of Cikutra, Bandung City. The study aims to find out how poor management of garbage in Cikutra can lead to conflict between citizens and the government, what factors are causing the accumulation of trash, and what resolutions the government is taking to resolve the conflict. The research uses descriptive qualitative methods by collecting data through in-depth interviews with the public and government apparatus. The results of the research show that the conflict is caused by several factors, among them: 1) a lack of education and public participation in good waste management programs. 2) limited local government budget for waste management, including the acquisition of waste transportation*

*infrastructure. 3) habit of people who like to dispose of garbage without delay. 4) lack of clear and precise rules such as the prohibition of disposal and sanctions for the offenders to make the community unclear. The conclusion of this study is that the conflict that occurs in the country is a complex problem and requires collaborative efforts between the public and the government to resolve it.*

**Keywords:** *Conflict, Waste, Environment, Issues, Resolution*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang menjadi isu penting yang dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju termasuk di Indonesia adalah permasalahan sampah. Sampah mengubah dan merusak struktur kehidupan manusia (Batubara et al, 2023). Permasalahan sampah memiliki potensi konflik yang tidak sekedar mencakup masalah lingkungan dan kebersihan saja (Hutasoit et al, 2024). Tata cara pengolahan sampah pada dasarnya masih sangat tradisional dan sering berubah menjadi praktik tanpa etika dengan membuang sampah secara sembarangan serta tidak mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan dan ini menjadi potret yang terjadi di Indonesia.

Produk hukum yang mengatur pengelolaan sampah tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 yang menekankan dua fokus utama yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang tertuang dalam produk hukum tersebut adalah dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengolahan akhir. Konteks utama pengolahan sampah difokuskan pada TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi masih dianggap tidak terlalu efektif dalam hal penanganan sampah.

Persampahan merupakan isu penting khususnya di daerah perkotaan, dimana jumlah penduduk di daerah perkotaan yang cukup banyak dan relative padat. Kehidupan manusia dengan semua aktivitasnya tidak terhenti dengan hal-hal yang berkaitan dengan sampah. Sampah merupakan dampak dari rangkaian aktivitas manusia dari skala kecil hingga besar.

Ketidakmampuan infrastruktur dan kebijakan yang memadai untuk mengelola sampah menyebabkan masalah lingkungan yang serius di Kelurahan Cikutra. Tumpukan sampah yang terkendala dengan bijak dapat menyebabkan pencemaran, menimbulkan aroma tidak sedap, dan menjadi sarang penyakit. Selain itu, konflik mungkin juga muncul antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta terkait dengan tanggung jawab, alokasi sumber daya, dan cara pengelolaan sampah yang efektif. Pendapat yang berbeda-beda tentang solusi terbaik untuk masalah ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidaksepakatan di antara para pemangku kepentingan.

Pengelolaan sampah yang tidak baik menimbulkan konflik antara warga dengan pemerintah terkhusus di Kelurahan Cikutra Jl. Sekepanjang 1 No. 47, Kec Cibeunying Kidul salah satu permasalahan nya yaitu tidak adanya TPS yang memadai yang mengakibatkan warga di cikutra membuang sampah ke daerah pasar cicadas meskipun

pemerintah telah melarang. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Konflik antara masyarakat dan pemerintah mengenai pengelolaan sampah”.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana pengelolaan sampah yang tidak baik di cikutra dapat menimbulkan konflik antara warga dengan pemerintah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan sampah di cikutra, resolusi apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik terkait pengelolaan sampah di cikutra. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan.

Dalam arti keseluruhan, konflik mengacu pada perbedaan dalam sudut pandang, pertempuran, ketidaksepakatan tentang ide atau keinginan dan konflik. Istilah ini juga menggambarkan perlawanan sejati di antara individu atau kelompok sosial, serta di antara negara-negara, yang menunjukkan adanya hal yang jelas sebagai kebalikan antara orang atau kelompok dalam suatu komunitas atau di antara negara-negara. Selain itu, Rahardjo mengatakan bahwa konflik sebagai teori di bidang sains memberikan pandangan baru tentang mereka yang mencerminkan perbedaan atau konflik dengan pandangan yang berbeda dan memahami tujuan yang diinginkan masyarakat menjadi lembaga sosial, tidak dilindungi dari konfrontasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Konflik adalah bagian yang sangat diperlukan dari kehidupan orang-orang di seluruh dunia (Septiyan, 2020:92).

Konflik muncul karena ada masalah, berbagai riwayat menjadi penyebab lahirnya konflik. Menurut para ilmuwan sosiolog, hal-hal yang menjadi akar masalah timbulnya konflik, yakni adanya perebutan terhadap

sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan yang jumlahnya sangat terbatas dan tidak merata dalam masyarakat (Septiyan, 2020:92).

Konflik dapat terjadi di mana saja, baik antara individu, kelompok, negara, maupun negara-negara. Individu yang berada dalam jarak yang dekat satu sama lain mungkin mengalami konflik terkait akses terhadap sumber daya material, kesempatan pernikahan, dan konflik yang disebabkan oleh konteks geografis (Parker 2006; Smith 1985; Ross 1983). Konflik juga dapat berkembang di antara penduduk suatu wilayah tertentu dan di antara kerabat dalam struktur sosial tertentu, termasuk persaingan untuk posisi dalam hierarki status atau dalam hal pertukaran ekonomi (Parker, Royle, dan Hartley 2002; Hames 2015). Penyelesaian konflik yang efektif sangat penting untuk kesejahteraan individu dan fungsi kelompok. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mempertahankan kerja sama skala besar, termasuk persaingan untuk posisi dalam hierarki status atau dalam hal pertukaran ekonomi (Parker & Hartley 2002; Hames 2015) (dalam Meilanny, 2023: 115).

Menurut Santos dan West, efektivitas resolusi konflik sangat penting bagi kesejahteraan dan berjalannya fungsi kelompok. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mempertahankan kerja sama dalam skala besar, termasuk di antara kerabat, sesama penduduk suatu wilayah, di antara orang asing, dan di dalam kelompok (dalam Meilanny, 2023: 116).

Penyelesaian konflik harus dari disiplin ilmu yang pluralistik, yang menginginkan sejumlah konsep dan metode untuk menangani berbagai jenis konflik yang terjadi sesuai dengan konteks masing-masing insiden

konflik. Penyelesaian konflik dengan pendekatan teori kritis menempatkan praktisi dalam peran baru untuk mengatasi dan memperbaiki penindasan terhadap masyarakat. Kolonialisme sosial dianggap sebagai konflik yang berlapis dan saling terkait, yang terjadi secara bersamaan pada tingkat individu, komunitas, dan masyarakat. Penyelesaian konflik berdasarkan teori kritis menjadi sarana untuk menantang ketidakadilan sosial dan penindasan (Meilanny, 2023: 118).

Para praktisi dan akademisi resolusi konflik memiliki *position* profesional yang penting karena mereka adalah ahli dalam memahami dan menangani konflik sosial secara komprehensif. Mereka memiliki keterampilan dalam berbagai proses inti seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, evaluasi, konferensi komunitas, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga terampil dalam mengurangi kekerasan dan memfasilitasi pembuatan peraturan yang bisa diterima bersama. Praktisi penyelesaian konflik dalam keilmuan ini memiliki kemampuan yang khas dalam melaksanak intervensi terhadap konflik seperti keadilan sosial. Para praktisi dan akademisi harus melakukan tahapan analisis kekuatan dari berbagai pemangku yang terlibat dalam konflik tersebut. Berdasarkan analisis kekuasaan ini, praktisi memeriksa bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam situasi tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti ras, gender, pendidikan, ekonomi, orientasi seksual, atau sejarah sosio-politik. Dengan pemahaman ini, mereka dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. (Meilanny, 2023: 120).

Resolusi konflik memiliki arti yang berbeda-beda menurut para ahli yang berfokus pada penelitian konflik. Menurut

Levine, resolusi dalam Kamus Webster adalah tindakan mengurai masalah, memecahkan, menghilangkan, atau mengeliminasi masalah. Sementara itu, Weitzman & Weitzman mendefinisikan resolusi konflik sebagai tindakan memecahkan masalah bersama. Fisher dkk. menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah upaya untuk mengatasi akar penyebab konflik dan membangun hubungan baru yang langgeng antara kelompok-kelompok yang berseberangan. Menurut Mindes, resolusi konflik adalah kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan orang lain dan merupakan aspek penting dari perkembangan sosial dan moral yang membutuhkan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, berkompromi, dan mengembangkan rasa keadilan. (Wisnu, 2021:5).

Secara teoritis, ada tiga cara utama dalam penyelesaian konflik (Septiyani, 2020:105):

1. Kesepakatan penyelesaian Konflik Kekerasan: Para praktisi menggunakan pranata adat untuk mendorong kesepakatan antara pelaku konflik yang berkonflik untuk mengakhiri tindakan kekerasan. Ini penting karena kekerasan adalah masalah yang sangat sensitif dan memerlukan penyelesaian yang efektif agar tidak berlarut-larut.
2. Proses kesepakatan dengan penuh tanggungjawab: Setelah mencapai kesepakatan, pihak yang berkonflik harus bertanggung jawab dalam menjalankan isi kesepakatan. Ini mencakup pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kesepakatan bisa berupa kompromi atau pemecahan masalah yang berbasis pada menciptakan solusi baru untuk memenuhi kepentingan semua pihak.

3. Harapan untuk Rekonsiliasi: Berakhirnya kekerasan dan pencapaian kesepakatan, penting bagi para pelaku untuk saling minta maaf dan menguatkan integrasi satu sama lain untuk bisa kembali bekerja sama secara konstruktif dalam masyarakat. Rekonsiliasi adalah kunci untuk mengembalikan harmoni di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Di sisi lain, ada juga pendekatan dalam penyelesaian konflik yang berpendapat bahwa terkadang, perselisihan tidak bisa diatasi dengan cara penyelesaian seperti yang dijelaskan di atas. Dalam situasi tersebut, diperlukan langkah-langkah yang tegas dan jelas. Penyelesaian konflik dengan cara ini lebih menekankan pada aspek hak dan kewajiban, serta mengutamakan keselarasan dan kepatutan dalam menemukan solusi yang memuaskan semua pihak yang berselisih. Adapun beberapa tahap dalam penyelesaian konflik yaitu:

1. **Negosiasi:** Negosiasi merupakan metode tradisional yang sering digunakan untuk menyelesaikan konflik, di mana pihak-pihak yang terlibat langsung berdiskusi untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Perbedaan persepsi yang muncul dapat diatasi melalui dialog yang mendalam, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang substansi masalah yang sedang dipertimbangkan. Namun, kegagalan untuk mencapai kesepakatan mungkin terjadi jika salah satu pihak menunjukkan sikap yang keras.
2. **Arbitrasi:** Arbitrasi merupakan proses dimana penyelesaian sengketa dilakukan dengan campur tangan pihak ketiga yang memberikan keputusan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Meskipun dapat

terjadi secara spontan dan tanpa formalitas, jika tidak ada pilihan untuk arbiter, biasanya pengadilan akan dijadikan alternatif penyelesaian sengketa.

3. **Mediasi:** Mediasi adalah metode yang melibatkan peran pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik, namun tanpa memberikan keputusan yang mengikat. Pihak ketiga, atau mediator, berperan sebagai fasilitator dalam proses komunikasi antara oknum yang bersengketa, bertujuan agar tercapai integrasi yang saling menguntungkan. Mediasi menekankan pada kebutuhan untuk adanya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat.
4. **Konsiliasi:** Konsiliasi merujuk pada serangkaian metode yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan bantuan pihak ketiga atau lembaga lainnya. Pendekatan ini dapat mencakup pembentukan komite atau kelompok penasehat untuk memberikan saran kepada oknum yang terlibat dalam sengketa. Konsiliasi bertujuan agar terjalin komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih guna mencapai kesepakatan bersama (Nita, 2019: 18).

Poin yang harus menjadi perhatian dalam mengatasi konflik menurut Galo (2017) (dalam Eko dkk, 2021:103) adalah melakukan resolusi konflik pihak yang akan bernegosiasi harus mempersiapkan pikiran kita terlebih dahulu. Mereka harus bersikap positif sambil secara jujur mengakui kemungkinan betapa sulitnya penyelesaian konflik. Oknum perlu mempertimbangkan oknum lain. Berusaha mengkaji situasi dari elemen yang berbeda. Hindari sikap emosional dan selalu berusaha bersikap tenang dan berpikiran dingin.

Perlunya ada persiapan menjadi kunci penting dalam menyelesaikan konflik. Semua oknum harus menyiapkan bahan yang seakurat dan berusaha melihat berbagai macam rujukan. Agar tujuan lebih optimal, maka perlu mengkaji waktu dan tempat sebagai bahan yang perlu dipertimbangkan. Dilarang menyelesaikan konflik melalui jaringan online. Hindari berkomunikasi ketika emosi sedang tinggi.

## II. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan pendekatan studi analisis dipilih untuk melakukan riset dan kajian konflik antara masyarakat dan pemerintah mengenai pengelolaan sampah. Terdapat 4 orang yang dipilih melalui pengambilan sumber informan dalam riset ini. Syarat informan dalam penelitian ini adalah Ketua RW 010, serta informan kunci yaitu Ibu Euis, selaku informan yang merasakan dampak dari konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah mengenai pengelolaan sampah di Wilayah Cibeunying Kidul yang kesanggupan partisipasi dalam penelitian ini. Upaya dilakukan untuk memilih informan dengan variasi maksimum dalam usia, pekerjaan, lama menjadi penduduk ataupun anggota keanggotaan susunan organisasi dalam masyarakat.

Pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara, dan penelitian dokumen yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2024 di kawasan Cibeunying Kidul. Data dari penelitian ini adalah hasil obrolan dengan informan yang disebut Schutz (2012) sebagai sikap alamiah pelaku, dan pelaku dianggap sebagai ruang dari kejadian dan permasalahan manusia dan kelompoknya.

Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan bagian dari

fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian memiliki urgensi agar dapat memberikan manfaat lebih lanjut melalui analisis yang objektif dan mendalam.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Penyebab Terjadinya Konflik Antara Warga Dengan Pemerintah Yang Disebabkan Pengelolaan Sampah Yang Tidak Baik

Pengelolaan sampah yang tidak baik mengakibatkan berbagai dampak masalah yang berpotensi menimbulkan konflik antara warga dengan pemerintah. Menurut informasi yang kami terima dari informan bahwa cibeunying kidul memiliki permasalahan yaitu tidak adanya TPS yang memadai dan mengakibatkan warga Cikutra membuang sampah ke daerah pasar cicadas meskipun pemerintah telah melarangnya. Akibat dari tidak adanya TPS juga menimbulkan gundukan sampah di bantaran jalan karena ada warga yang membuang sampah secara sembarangan, hal tersebut membuat sebagian warga protes dan marah karena tumpukan sampah tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap dan menghalangi jalan.

Menurut informan peneliti, sebenarnya pemerintah setempat memiliki petugas yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah. Seharusnya petugas tersebut mengangkut sampah setiap hari, tetapi karena hanya ada satu petugas yang bertugas untuk satu RW, sehingga pengangkutan sampah hanya dapat dilakukan satu minggu sekali bahkan dua minggu sekali. Hal tersebut membuat warga protes karena warga merasa sudah membayar iuran untuk pengangkutan sampah ini setiap bulan per-KK, tetapi pengangkutan sampah jarang sekali dilakukan dan membuat warga mau tidak mau kembali membuang sendiri sampah ke daerah

pasar cicadas atau tempat pembakaran sampah yang ada daripada menunggu sampah terus menumpuk.

### 3.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Sampah di Cikutra

Penumpukan sampah di Cikutra merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan didasarkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kurangnya edukasi mengenai pengelolaan sampah yang tepat, menyebabkan banyak masyarakat membuang semua jenis sampah rumah tangga mereka hanya ke satu tempat yang sama tanpa di pilah terlebih dahulu.
2. Kurangnya Infrastruktur pengangkutan dan pengelolaan sampah yang memadai. Seperti yang dikatakan oleh informan bahwa pengangkutan sampah di Cikutra hanya dilakukan satu kali dalam seminggu karena keterbatasan jumlah petugas, tidak adanya TPS yang memadai, mengakibatkan warga mau tidak mau membuang sampah di sekitar pasar Cicadas meskipun hal tersebut dilarang oleh pemerintah, kurangnya fasilitas pengolahan sampah menyebabkan sampah tidak terangkut dan diolah dengan baik.
3. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah, termasuk pengadaan infrastruktur dan operasional yang menghambat upaya peningkatan kapasitas pengangkutan dan pengelolaan sampah. Menurut informan pangkal kami, penyebab terbatasnya jumlah petugas pengangkut sampah yaitu petugas pengangkut sampah tersebut tidak ingin diperbanyak karena jika petugasnya

diperbanyak maka pendapatannya juga akan berkurang karena gaji yang dia dapat biasanya juga sangat kecil.

4. Kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Informan kami mengatakan bahwa kebiasaan membuang sampah ini sudah terjadi sedari dulu dan tidak ada solusinya.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah. Menurut informan kunci kita yaitu Ibu RW, bahwa pemerintah kota telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pengelolaan sampah untuk mengurangi, memilah dan memanfaatkan sampah. Pemerintah daerah terutama RW juga berupaya untuk membangun bank sampah tetapi belum terbentuk karena masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Informan juga menyebut adanya upaya untuk mengolah sampah menjadi pupuk, tetapi hanya sedikit orang yang tertarik dan pelaksanaannya belum efektif. Selain itu, adanya program dari PKK yang relevan dengan masalah sampah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala karena sulitnya berhadapan dengan masyarakat yang belum mau memilah sampah. Kesadaran masyarakat terhadap sampah masih rendah, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tersebut.
6. Kurangnya aturan yang jelas dan tegas tentang pengelolaan sampah seperti larangan membuang sampah secara sembarangan, dan saksi bagi para pelanggar agar membuat masyarakat jera.

### **3.3 Resolusi Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menyelesaikan Konflik Terkait Pengelolaan Sampah di Cikutra**

Pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk penanggulangan konflik terkait tata kelola sampah di kelurahan Cikutra, yaitu: *pertama*, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dengan melakukan penyuluhan pengelolaan sampah dan pembuatan pupuk kompos. Menurut informasi yang kami terima dari Bu Nur selaku salah satu warga Cikutra mengenai program pemilahan sampah dan pengelolaan kompos, Bu Nur menyebutkan bahwa sudah ada program yang dilakukan oleh pemerintah terkait kompos dan pengelolaan sampah, namun tidak semua masyarakat terlibat dalam program tersebut.

Lalu, informan mengatakan bahwa fasilitas untuk pemilahan sampah seperti ember untuk membuat pupuk kompos telah diberikan oleh pihak pemerintah setempat. Informan juga menyebutkan bahwa belum pernah melakukan pengolahan sampah sendiri, hanya menerima fasilitas dari pemerintah. Ketika ditanya mengapa informan tidak melakukan pengolahan sendiri, informan mengaku sulit untuk melakukannya, karena untuk melakukan pembuatan pupuk kompos itu memerlukan waktu yang lama, dimulai dari pemilihan sampah hingga penyimpanannya yang dapat menimbulkan bau tidak sedap pada lingkungan sekitar.

Selanjutnya, dalam konteks pembagian pemilahan sampah, informan mengatakan bahwa pembagian tersebut belum menyeluruh dan hanya sebagian warga dan kader PKK yang terlibat. Kedua, Pemerintah daerah terutama RW juga sudah berupaya untuk membangun bank sampah tetapi belum berhasil terbentuk karena masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah.

Informan kunci peneliti yaitu Ibu Rw mengatakan bahwa pemerintah sudah berupaya untuk melakukan kebijakan dalam menangani permasalahan sampah ini, tetapi masyarakatnya yang masih kurang kesadarannya dalam memilah sampah, masyarakat juga tidak mau atau kurang berpartisipasi dalam semua program yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani masalah ini.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Pengelolaan sampah yang kurang bijak dapat menumbuhkan berbagai masalah yang berpotensi menimbulkan konflik antara warga dengan pemerintah, seperti yang terjadi di kelurahan Cikutra, Kota Bandung. Akibat dari tidak adanya TPS, yang menimbulkan gundukan sampah di bantaran jalan karena ada warga yang membuang sampah secara sembarangan, hal tersebut membuat sebagian warga protes dan marah karena tumpukan sampah tersebut menimbulkan aroma busuk dan menghalangi jalan. Penumpukan sampah di Cikutra merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Kurangnya edukasi mengenai pengelolaan sampah yang tepat, kurangnya infrastruktur pengangkutan dan pengelolaan sampah yang memadai, keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah, kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah, kurangnya aturan yang jelas dan tegas tentang pengelolaan sampah. Pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk menyelesaikan konflik terkait pengelolaan sampah di kelurahan Cikutra, yaitu: *pertama*, peningkatan edukasi dan partisipasi

masyarakat dengan melakukan penyulusan pengelolaan sampah dan pembuatan pupuk kompos. *Kedua*, Pemerintah daerah terutama RW juga berupaya untuk membangun bank sampah tetapi belum berhasil terbentuk karena masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah.

#### 4.2 Saran

Kami menyarankan tingkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang baik, Membuat kampanye edukasi mengenai pentingnya daur ulang, pemilahan sampah, dan penggunaan kembali barang. Melibatkan seluruh masyarakat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui pelatihan dan program partisipasi. Membangun atau meningkatkan fasilitas pengolahan sampah seperti tempat pembuangan akhir sementara di daerah cikutra, pusat daur ulang, dan fasilitas pengomposan di bagikan secara merata kepada masyarakat. Menyediakan fasilitas pengumpulan sampah yang efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Meningkatkan sistem pengangkutan sampah yang efektif dan terjadwal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Batubara, M. Z., Rahmah, N., Simbolon, W., Agustina, T., & Hasanuddin, H. (2023). Alam Sumber Kehidupan: Melirik Kehidupan Masyarakat Petuk Katimpun Di Pinggiran Sungai Rungan. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 175–181. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.488>

Hudan Fua'di, Septiyan. “Resolusi konflik social perspektif islam dan hokum adat pada pemilihan kepada desa bajang mlarak ponorogo”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No. 1. Vol. 2. Tahun 2020.

Hutasoit, J., Aji, G. P., Santika, E., Batubara, M. Z., Saragih, O. K., & Adiwijaya, S. (2024). Tentang Aku, Kamu, Dan Lingkungan Kita: Perilaku Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Sekitar Sungai Kahayan. *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 24–35. <https://doi.org/10.20527/multikultural.v2i2.365>

Santoso, Meilany Budiarti. “Menyoal resolusi konflik berdasarkan perspektif teori kritis”, *Kolaborasi Resolusi Konflik*, No.2. Vol 5. Tahun 2023.

Sudarmanto, E., Tjiptadi, D. D., Sari, D. P., Tjahjana, D., Wibowo, E., Mardiana, S. S. & Verayanti, N. (2021). *Manajemen Konflik*. Jakarta: Penerbit Yayasan Kita Menulis,

Sudarnoto, Wisnu. “Resolusi Konflik”. *Jurnal social dan budaya syar-I*, No.1. Vol.2. Tahun 2015.

Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian sengketa alternative dengan model mediasi, arbitrase, negosiasi, konsoliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Yufrinalis, M., & Fil, S. Wawancara Sebagai Teknik Pengumpulan Data. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 53.